



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS
PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Irvan Dhani Prabowo¹, Supardal²

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta^{1,2}

Email : idthanipkul@gmail.com¹, gusdal66@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengawasan berperan penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efisien dan efektif serta mencegah penyimpangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan adopsi teknologi informasi yang masih minim menjadi kendala utama. Keterbatasan ini menyebabkan proses pengawasan sering terlambat dan berdampak pada penurunan kualitas hasil audit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti penambahan jumlah tenaga pengawas yang berkualitas, peningkatan alokasi anggaran, dan pengembangan sistem informasi pengawasan berbasis teknologi.

Kata Kunci: *pengawasan, efektivitas, tata kelola*

ABSTRACT

This study analyzes the factors that influence the effectiveness of supervision of the Inspectorate of the Special Region of Yogyakarta. Supervision plays an important role in ensuring efficient and effective governance and preventing deviations. This study uses a qualitative approach with interview methods and documentation analysis. The results of the study indicate that limited human resources, budget, and minimal adoption of information technology are the main obstacles. These limitations cause the supervision process to be often late and have an impact on the decline in the quality of audit results. This study concludes that to improve the effectiveness of supervision, strategic steps are needed, such as increasing the number of qualified supervisors, increasing budget allocations, and developing a technology-based supervision information system.

Keywords: *supervision, effectiveness, governance*

PENDAHULUAN

Pengawasan merupakan elemen krusial dalam tata kelola organisasi, termasuk pemerintahan daerah (Nabilah & Canallidhy, 2018) Tujuan utama pengawasan dalam konteks pemerintahan adalah memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan perencanaan, standar yang telah ditetapkan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ariandi, 2019). Pengawasan yang efektif dapat mencegah penyimpangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan pencapaian tujuan organisasi secara optimal (Islamiah, 2016). Sebaliknya, kelemahan dalam pengawasan dapat mengakibatkan berbagai permasalahan, seperti korupsi, penyalahgunaan anggaran, dan penurunan kualitas pelayanan publik (Putra, 2015). Studi oleh Rahman dan Fuad (2020) menekankan bahwa pengawasan yang lemah berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya kasus korupsi di sektor publik.

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berperan sebagai lembaga pengawas internal pemerintah dengan tugas strategis dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan peraturan daerah, tugas utama Inspektorat Daerah meliputi pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pemberian dukungan teknis



kepada perangkat daerah, serta memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program pemerintahan (Tuidano, 2017). Namun, penelitian oleh Remus (2017) mengindikasikan bahwa dalam praktiknya, Inspektorat menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas pengawasan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran)

Tantangan utama yang dihadapi Inspektorat DIY mencakup keterbatasan sumber daya manusia, di mana jumlah auditor yang tersedia tidak sebanding dengan beban kerja yang tinggi. Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan pengawasan yang menyeluruh, termasuk evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan. Kebutuhan akan transformasi teknologi informasi dalam mendukung pengawasan berbasis digital juga belum terpenuhi secara optimal. Kesenjangan ini diperparah dengan kompleksitas tugas yang sering kali melibatkan permasalahan lintas sektor. Analisis oleh Rafif (2021) menunjukkan bahwa keterbatasan ini dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah.

Permasalahan ini menjadi semakin krusial mengingat adanya berbagai kasus yang mengindikasikan lemahnya pengawasan, seperti dugaan korupsi pada proyek infrastruktur dan penyalahgunaan aset pemerintah. Contoh nyata adalah kasus korupsi pada proyek pembangunan Stadion Mandala Krida di Yogyakarta, di mana terjadi dugaan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp31,7 miliar akibat manipulasi dalam proses lelang dan penggunaan tenaga kerja yang tidak memenuhi standar (KPK, 2022). Kasus lain melibatkan penyalahgunaan tanah kas desa oleh oknum pejabat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, yang menerima gratifikasi berupa dua bidang tanah senilai Rp4,7 miliar serta sejumlah uang tunai (KPK, 2019). Studi oleh Tandi (2020) menekankan bahwa kelemahan dalam pengawasan internal pemerintah daerah dapat membuka celah bagi praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait efektivitas pengawasan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini berupaya menggali informasi mengenai proses pengawasan, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan oleh Inspektorat DIY dalam menjalankan fungsinya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi langsung, serta telaah dokumen yang relevan dengan aktivitas pengawasan di lingkungan Inspektorat DIY.

Lokasi penelitian dilakukan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis Inspektorat DIY sebagai lembaga pengawas internal pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap evaluasi dan pengawasan program-program pemerintahan. Penelitian ini melibatkan beberapa informan kunci, termasuk pejabat Inspektorat, auditor internal, serta pegawai yang terlibat langsung dalam proses pengawasan. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pihak eksternal yang memiliki hubungan dengan Inspektorat DIY, seperti akademisi dan pakar tata kelola pemerintahan, guna memperoleh perspektif yang lebih luas terkait efektivitas pengawasan di daerah ini.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis tematik, di mana data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dikategorikan ke dalam tema-tema tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Validitas data diperiksa melalui triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen resmi yang tersedia (Abdussamad, Z., 2021). Penelitian ini diharapkan dapat



memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat DIY, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor-faktor ini mencakup sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, sistem informasi dan teknologi, kompleksitas tugas, serta dampak efektivitas pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan (Masnia, 2021). Berikut adalah hasil penelitian yang lebih terperinci:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam efektivitas pengawasan (Yana, 2020). Beberapa temuan terkait SDM dalam pengawasan Inspektorat DIY meliputi:

Jumlah Auditor Tidak Memadai:

Pada tahun 2024, Inspektorat DIY memiliki 73 personel pengawasan, termasuk auditor dan staf administrasi. Namun, menurut standar dari Kementerian PANRB, jumlah auditor yang ideal untuk mengawasi pemerintahan DIY adalah minimal 120 auditor, sementara yang tersedia hanya sekitar 60% dari kebutuhan (Albizzia, O., Sulistiana, U., & Supardal, 2018).

Ketimpangan Tingkatan Auditor:

Dari 73 personel, auditor madya hanya berjumlah 8 orang, jauh dari jumlah ideal sebanyak 24 auditor madya. Auditor madya memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pengawasan, sehingga kekurangan ini menyebabkan kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan (Ariandi, A. 2019).

Beban Kerja Berlebihan:

Setiap auditor menangani lebih dari 10 hingga 15 unit kerja yang diawasi, padahal standar yang disarankan adalah maksimal 5 unit kerja per auditor. Hal ini menyebabkan kurangnya ketelitian dalam audit, keterlambatan pelaporan, serta evaluasi yang kurang mendalam.

Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan:

Auditor yang bertugas masih mengalami keterbatasan dalam pelatihan terkait audit berbasis teknologi, analisis risiko, serta investigasi keuangan yang lebih kompleks. Kurangnya pelatihan ini menghambat efektivitas pengawasan dalam mengantisipasi modus penyimpangan keuangan yang semakin canggih (Yemima, 2024).

2. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor yang signifikan dalam memengaruhi efektivitas pengawasan. Beberapa temuan terkait anggaran adalah:

Alokasi Anggaran Minim untuk Pengawasan:

Anggaran yang tersedia untuk Inspektorat DIY hanya sekitar 1,2% dari total anggaran daerah, yang sebagian besar digunakan untuk operasional dasar. Akibatnya, banyak program pengawasan yang tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh (Handoko, T. H, 2018).

Dampak dari minimnya alokasi anggaran ini meliputi:

Berbagai program pengawasan harus diprioritaskan berdasarkan urgensi, sehingga beberapa sektor berisiko tinggi tidak mendapatkan pengawasan optimal. Terbatasnya jumlah auditor yang dapat diterjunkan ke lapangan, mengingat biaya operasional yang diperlukan untuk mendukung perjalanan dinas dan investigasi lapangan. Pengurangan cakupan audit, di mana pengawasan yang idealnya mencakup seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus diseleksi hanya pada kasus-kasus yang dianggap paling krusial. Dalam setahun, hanya

sekitar 30% auditor yang mendapatkan pelatihan atau sertifikasi tambahan, sementara sisanya tidak mendapatkan peningkatan kompetensi akibat keterbatasan dana.

Pelatihan yang diperlukan bagi auditor mencakup:

Sertifikasi audit berbasis risiko (Risk-Based Audit) yang penting untuk mengidentifikasi sektor dengan potensi penyimpangan tinggi. Pelatihan investigasi keuangan yang diperlukan untuk mendeteksi modus-modus korupsi yang semakin kompleks. Penggunaan teknologi dalam audit seperti forensik digital dan analisis big data untuk mengungkap pola penyimpangan anggaran secara lebih efektif. Di beberapa negara dengan sistem pengawasan yang lebih maju, auditor diwajibkan untuk mengikuti pelatihan setidaknya dua kali dalam setahun, sedangkan di DIY, auditor hanya bisa mengakses pelatihan setiap dua atau tiga tahun sekali, yang mengakibatkan kesenjangan kompetensi dalam menghadapi perubahan regulasi dan teknologi pengawasan (Trisnawati et al., 2018).

Dampak dari keterbatasan anggaran pelatihan ini meliputi:

Kurangnya auditor bersertifikat, yang membuat kualitas audit tidak optimal. Minimnya kemampuan auditor dalam mendeteksi kejahatan keuangan modern, seperti rekayasa laporan keuangan dan pencucian uang melalui proyek pemerintah. Tertinggalnya Inspektorat DIY dalam penerapan metodologi audit berbasis teknologi, yang sudah diterapkan di beberapa daerah lain dengan anggaran pelatihan lebih besar.

Dampak Terhadap Mobilitas Auditor:

Pengawasan yang memerlukan kunjungan langsung ke lokasi, seperti audit keuangan dan pengawasan proyek fisik, sering kali terkendala akibat keterbatasan anggaran perjalanan dinas. Hal ini menyebabkan proses verifikasi lapangan tidak berjalan optimal. Pengawasan proyek infrastruktur tidak dapat dilakukan secara langsung di semua lokasi, terutama di daerah terpencil yang membutuhkan biaya perjalanan tinggi.

Investigasi terhadap dugaan penyimpangan keuangan menjadi terbatas, karena auditor hanya bisa melakukan verifikasi dokumen tanpa bisa mengecek kondisi nyata di lapangan. Tidak adanya anggaran untuk penggunaan alat bantu pengawasan, seperti drone untuk memantau proyek fisik atau perangkat lunak audit berbasis kecerdasan buatan.

Dalam beberapa kasus, auditor terpaksa melakukan pengawasan hanya berdasarkan laporan tertulis yang diberikan oleh pihak yang diaudit, tanpa bisa melakukan inspeksi fisik. Hal ini berpotensi membuka celah bagi manipulasi data dan laporan fiktif dalam proyek-proyek yang seharusnya diaudit lebih ketat (Mahulae et al., 2022).

Dampak lebih lanjut dari keterbatasan mobilitas ini mencakup:

Menurunnya akurasi hasil audit, karena pengawasan hanya berbasis dokumen tanpa verifikasi lapangan. Terbatasnya deteksi penyimpangan dalam proyek pembangunan fisik, seperti pengurangan kualitas material atau keterlambatan yang tidak dilaporkan. Lambatnya tindak lanjut terhadap temuan audit, karena keterbatasan dana juga menghambat investigasi lanjutan terhadap kasus yang ditemukan. Perbandingan dengan Inspektorat Daerah Lain di Indonesia Sebagai perbandingan, beberapa daerah lain di Indonesia memiliki alokasi anggaran yang lebih besar untuk inspektorat, yang berdampak pada efektivitas pengawasan yang lebih baik. Misalnya:

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan 2,5% dari total APBD-nya untuk pengawasan, sehingga mampu melakukan audit mendalam terhadap berbagai program pemerintah daerah. Inspektorat Jawa Barat memiliki anggaran pengawasan yang lebih besar untuk pelatihan auditor, yang memungkinkan peningkatan kapasitas SDM secara berkala. Inspektorat Jawa Timur telah mengadopsi teknologi audit berbasis data berkat dukungan anggaran yang lebih baik, yang mempercepat proses deteksi penyimpangan keuangan.

Dari perbandingan ini, terlihat bahwa alokasi anggaran yang lebih besar berkontribusi langsung terhadap efektivitas pengawasan, terutama dalam hal kemampuan untuk



melaksanakan audit yang lebih luas dan mendalam. Peningkatan kapasitas auditor melalui pelatihan dan sertifikasi. Penggunaan teknologi canggih dalam proses pengawasan. Beberapa aspek yang terdampak oleh keterbatasan anggaran meliputi minimnya Alokasi Dana untuk Audit Independen Inspektorat DIY masih mengandalkan dana dari pemerintah daerah yang terbatas. Dalam beberapa kasus, kurangnya anggaran menghambat pelaksanaan audit independen yang lebih mendalam terhadap sektor-sektor yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan keuangan (Trisnawati et al., 2018). Kurangnya Dana untuk Pengembangan SDM Pelatihan auditor membutuhkan anggaran tambahan, terutama untuk sertifikasi internasional di bidang audit forensik dan teknologi pengawasan modern. Namun, dalam lima tahun terakhir, alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas auditor mengalami stagnasi (Nurfaidah, 2018).

Kendala Logistik dan Operasional

Terbatasnya anggaran juga berdampak pada kurangnya fasilitas operasional, seperti perangkat lunak audit berbasis data, kendaraan operasional untuk inspeksi lapangan, serta akses ke sistem informasi keuangan daerah yang lebih mutakhir (Handoko, 2018).

Untuk mengatasi keterbatasan ini, beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan adalah:

1. Meningkatkan alokasi anggaran Inspektorat DIY menjadi minimal 2% dari total APBD, agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih optimal.
2. Memprioritaskan anggaran untuk pelatihan dan sertifikasi auditor, terutama dalam bidang investigasi keuangan dan teknologi audit berbasis data.
3. Mengajukan dana tambahan melalui skema hibah atau kerja sama dengan lembaga lain, seperti KPK dan BPKP, untuk mendukung audit proyek skala besar.
4. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pengawasan, seperti audit berbasis kecerdasan buatan atau pemantauan proyek menggunakan drone, guna mengurangi ketergantungan pada pengawasan lapangan yang mahal.
5. Meningkatkan kerja sama dengan inspektorat daerah lain yang memiliki anggaran lebih besar, untuk berbagi sumber daya dalam pelatihan dan teknologi pengawasan.

Dengan langkah-langkah ini, Inspektorat DIY diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasannya dan memperkuat perannya dalam mencegah penyimpangan keuangan di pemerintahan daerah.

3. Sistem Informasi dan Teknologi

Kemajuan teknologi berperan penting dalam mendukung efektivitas pengawasan. (Tandi, R., 2020). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat DIY masih menghadapi beberapa tantangan dalam aspek ini minimnya Digitalisasi dalam pengawasan di Inspektorat DIY masih banyak dilakukan secara manual atau semi-digital. Sebagian besar pencatatan hasil audit masih menggunakan dokumen fisik, sehingga menyulitkan pencarian data dan memperlambat proses analisis.

Dampak minimnya digitalisasi dalam pengawasan proses audit lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan manusia (human error) karena masih bergantung pada dokumen fisik. Kesulitan dalam pencarian data historis karena tidak adanya basis data terpusat yang menyimpan laporan audit sebelumnya secara sistematis. Kurangnya transparansi dalam pelaporan karena hasil audit tidak langsung terhubung ke sistem yang dapat diakses oleh pihak terkait secara real-time.

Tertundanya tindak lanjut hasil pengawasan, karena birokrasi masih mengandalkan proses administrasi manual dalam menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada dinas terkait.

Dalam beberapa daerah lain di Indonesia, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, sistem digitalisasi pengawasan telah diterapkan dalam bentuk platform berbasis cloud yang memungkinkan auditor untuk mengakses data kapan saja dan dari mana saja (Islamiah et al.,



2016). Sistem pengawasan yang tidak terintegrasi saat ini, belum ada sistem informasi yang terintegrasi antara Inspektorat DIY dengan dinas-dinas lain. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pertukaran informasi terkait keuangan, pelaksanaan proyek, serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Dampak dari tidak adanya sistem terintegrasi keterlambatan dalam pertukaran informasi terkait keuangan dan pelaksanaan proyek, karena setiap instansi memiliki sistem pencatatan masing-masing yang tidak saling terkoneksi. Ketidakefisienan dalam pemantauan anggaran dan realisasi proyek, karena auditor harus mengumpulkan data secara manual dari berbagai dinas sebelum melakukan analisis.

Kurangnya koordinasi dalam tindak lanjut hasil audit, sehingga rekomendasi perbaikan dari Inspektorat sering kali tidak segera diimplementasikan oleh dinas terkait. Sulitnya mendeteksi potensi penyimpangan anggaran lebih awal, karena tidak ada dashboard pemantauan yang memungkinkan auditor melihat laporan keuangan daerah secara real-time. Beberapa pemerintah daerah yang lebih maju dalam sistem pengawasan telah menggunakan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIPD) yang memungkinkan semua instansi terkait untuk mengakses dan memperbarui data secara bersamaan (Nurfaidah, 2018).

Belum menggunakan analisis data berbasis risiko penggunaan big data dan artificial intelligence dalam analisis risiko pengawasan masih belum diterapkan. Padahal, teknologi ini dapat membantu auditor dalam mengidentifikasi pola penyimpangan dan mencegah korupsi lebih cepat.

Manfaat analisis data berbasis risiko mendeteksi penyimpangan sejak dini dengan menganalisis pola transaksi keuangan yang mencurigakan. Memprioritaskan pengawasan pada area yang paling berisiko, sehingga auditor dapat lebih fokus pada sektor-sektor yang rentan terhadap penyalahgunaan anggaran. Mempercepat proses audit dengan mengotomatisasi pemeriksaan dokumen dan data keuangan, mengurangi ketergantungan pada metode manual. Meningkatkan akurasi hasil audit, karena sistem berbasis AI dapat memindai ribuan transaksi keuangan untuk menemukan anomali atau transaksi mencurigakan. Sebagai contoh, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengembangkan sistem big data untuk mendeteksi indikasi fraud dalam laporan keuangan negara, yang terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengawasan (Mahulae et al., 2022). Tantangan keamanan data kurangnya sistem keamanan siber juga menjadi ancaman, mengingat data audit merupakan informasi sensitif yang harus dijaga kerahasiaannya agar tidak disalahgunakan (Rahmatullah et al., 2024).

Keterbatasan infrastruktur teknologi di inspektorat DIY Selain masalah integrasi dan analisis data, Inspektorat DIY juga menghadapi kendala dalam infrastruktur teknologi yang belum memadai, termasuk kurangnya komputer dan perangkat lunak khusus audit yang mendukung analisis data keuangan secara cepat dan akurat. Tidak adanya sistem pengarsipan elektronik yang modern, sehingga masih banyak dokumen audit yang hanya tersedia dalam bentuk fisik. Kurangnya tenaga IT yang mendukung pengelolaan sistem pengawasan digital, karena sebagian besar pegawai Inspektorat DIY tidak memiliki latar belakang teknologi informasi.

Keamanan data yang belum optimal, sehingga informasi audit berisiko disalahgunakan atau diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Beberapa daerah telah mulai menerapkan Blockchain dalam pengawasan keuangan daerah untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko manipulasi data. Namun, teknologi ini belum diadopsi oleh Inspektorat DIY karena keterbatasan infrastruktur dan anggaran (Rahmatullah et al., 2024).

Meskipun kemajuan teknologi telah memberikan peluang besar dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, Inspektorat DIY masih menghadapi berbagai tantangan dalam



digitalisasi proses audit, integrasi sistem, analisis risiko berbasis AI, serta infrastruktur IT yang belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital dalam sistem pengawasan, sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

4. Kompleksitas Tugas dan Tantangan Eksternal

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi tantangan besar dalam menangani pengawasan yang semakin kompleks. Seiring dengan meningkatnya dinamika pemerintahan dan kebijakan nasional, peran Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal semakin diperluas dan menghadapi berbagai kendala. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kompleksitas tugas ini antara lain:

Mandat yang berubah-ubah Inspektorat DIY sering kali mendapatkan tugas tambahan dari pemerintah pusat atau kementerian yang mengubah prioritas pengawasan. Misalnya, adanya instruksi baru mengenai pengawasan belanja daerah untuk proyek infrastruktur dalam waktu yang singkat. Inspektorat DIY tidak hanya bertanggung jawab mengawasi keuangan daerah, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tata kelola proyek infrastruktur, serta pencegahan korupsi. Beban kerja ini semakin meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang terus berkembang (Kementerian PANRB, 2023).

Dampak dari Mandat yang berubah-ubah pengawasan menjadi tidak fokus, karena Inspektorat harus terus menyesuaikan program kerja dengan kebijakan terbaru dari pusat. Beban kerja meningkat, terutama ketika Inspektorat harus menangani instruksi mendadak yang tidak masuk dalam rencana kerja tahunan. Efisiensi pengawasan menurun, karena auditor harus membagi perhatian antara tugas rutin dan tugas tambahan yang diberikan oleh kementerian atau lembaga pusat lainnya. Kurangnya kesiapan SDM dan infrastruktur, karena penyesuaian kebijakan sering kali tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas auditor maupun dukungan teknologi yang memadai.

Pengawasan atas kasus-kasus besar inspektorat DIY juga memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai kasus besar yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan daerah dan kepercayaan publik. Beberapa kasus yang menuntut pengawasan lebih dalam, antara lain:

a. Kasus Renovasi Stadion Mandala Krida

Proyek renovasi Stadion Mandala Krida terindikasi merugikan negara sebesar Rp31,7 miliar akibat manipulasi lelang dan penyalahgunaan wewenang. Kasus ini memerlukan audit mendalam terhadap penggunaan anggaran serta proses tender proyek yang dilakukan oleh instansi terkait (Firdaus, 2023).

Kendala dalam pengawasan kasus ini keterbatasan akses terhadap dokumen proyek, karena banyak data yang bersifat rahasia atau telah dimanipulasi sebelum diaudit. Kurangnya tenaga auditor yang memiliki keahlian dalam audit forensik proyek infrastruktur, sehingga analisis keuangan dan teknis memerlukan waktu lebih lama. Lambatnya tindak lanjut hasil audit, karena keterbatasan wewenang Inspektorat dalam merekomendasikan tindakan hukum terhadap pihak yang terlibat.

b. Penyalahgunaan Tanah Kas Desa

Kasus penyalahgunaan tanah kas desa di DIY juga menjadi perhatian utama Inspektorat. Dalam kasus ini, seorang pejabat terindikasi menerima gratifikasi senilai Rp4,7 miliar terkait penyalahgunaan aset tanah desa untuk kepentingan pribadi dan pihak swasta (Firdaus, 2023). Hambatan dalam pengawasan kasus ini sulitnya melacak aliran dana, karena penggunaan tanah kas desa sering kali melibatkan transaksi tidak langsung melalui pihak ketiga. Minimnya regulasi yang spesifik terkait penggunaan tanah kas desa, yang membuat proses audit dan pengawasan menjadi lebih sulit. Kurangnya koordinasi dengan pemerintah



desa, sehingga investigasi yang dilakukan Inspektorat DIY sering kali mengalami hambatan administratif.

c. Praktik Pungutan Liar di Sektor Pendidikan

Dugaan pungutan liar di beberapa sekolah negeri di DIY menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan keuangan pendidikan. Beberapa sekolah diduga mewajibkan siswa untuk membeli seragam dengan harga di atas standar yang ditentukan, yang menyebabkan beban keuangan tambahan bagi orang tua siswa (Ria & Junianto, 2023).

Kesulitan dalam pengawasan kasus ini sulitnya mendapatkan bukti transaksi resmi, karena pungutan dilakukan secara informal. Kurangnya pengawasan langsung di sekolah-sekolah, mengingat jumlah auditor yang terbatas dibandingkan dengan banyaknya sekolah yang diawasi. Minimnya sistem pengaduan masyarakat yang efektif, sehingga sulit bagi Inspektorat untuk mendeteksi dan menangani praktik semacam ini sejak dini. Kurangnya koordinasi dengan lembaga lain inspektorat DIY sering kali mengalami hambatan dalam koordinasi dengan lembaga eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menyebabkan tumpang tindih dalam pengawasan dan lambatnya penanganan tindak lanjut audit.

Keterbatasan Wewenang Inspektorat DIY tidak bekerja sendiri dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Dalam beberapa kasus, koordinasi dengan lembaga eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat diperlukan. Namun, dalam praktiknya, Inspektorat sering kali menghadapi kendala dalam menjalin kerja sama yang efektif dengan lembaga-lembaga tersebut.

Beberapa kendala koordinasi yang terjadi tumpang tindih dalam pengawasan, di mana Inspektorat DIY, BPK, dan KPK terkadang melakukan audit terhadap objek yang sama dengan standar yang berbeda, menyebabkan inkonsistensi hasil audit. Lambatnya tindak lanjut hasil audit, karena Inspektorat hanya memiliki kewenangan memberikan rekomendasi, sementara keputusan akhir berada di tangan lembaga lain yang memiliki wewenang lebih besar.

Kurangnya akses terhadap data lintas lembaga, yang membuat Inspektorat kesulitan dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mendukung investigasi lebih lanjut. Birokrasi yang kompleks dalam proses koordinasi, sehingga pengawasan terhadap kasus tertentu memakan waktu lebih lama sebelum sampai pada tahap penindakan. Dampak dari kurangnya koordinasi ini banyaknya kasus yang tidak segera ditindaklanjuti, meskipun sudah ditemukan indikasi penyimpangan dalam audit awal. Kurangnya efektivitas dalam pencegahan korupsi, karena masing-masing lembaga bekerja secara terpisah tanpa sistem yang benar-benar terintegrasi. Meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap pengawasan pemerintah, karena banyaknya kasus yang tidak terselesaikan dalam waktu yang wajar. Sebagai contoh, dalam kasus renovasi Stadion Mandala Krida, Inspektorat DIY telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil auditnya. Namun, tanpa adanya dukungan dari lembaga penegak hukum, rekomendasi tersebut tidak selalu diimplementasikan secara efektif (Ernes, 2023).

5. Efektivitas Pengawasan dan Implikasinya

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pengawasan Inspektorat DIY dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

Ketepatan waktu pengawasan banyak proses pengawasan yang mengalami keterlambatan akibat beban kerja auditor yang tinggi dan sistem pelaporan yang belum efisien. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan audit sangat penting untuk mendeteksi penyimpangan sejak dini dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Namun, di Inspektorat DIY, banyak proses pengawasan yang mengalami keterlambatan akibat beberapa faktor:

Penyebab keterlambatan dalam pengawasan beban kerja auditor yang tinggi: Setiap auditor menangani lebih dari 10 hingga 15 unit kerja, padahal idealnya maksimal 5 unit kerja



per auditor (Ariandi, 2019). Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pemeriksaan karena setiap audit membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sistem pelaporan yang belum efisien: Pelaporan audit masih dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga proses verifikasi dan dokumentasi membutuhkan waktu lebih lama. Kurangnya koordinasi dengan dinas terkait: Dalam beberapa kasus, Inspektorat DIY mengalami kesulitan mendapatkan data keuangan atau laporan pertanggungjawaban dari dinas terkait, yang memperlambat proses audit.

Dampak dari ketidaktepatan waktu pengawasan tertundanya deteksi penyimpangan: Jika audit dilakukan terlambat, ada kemungkinan bahwa penyimpangan keuangan sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama sebelum ditemukan. Menurunnya kepercayaan terhadap Inspektorat: Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mungkin melihat Inspektorat sebagai lembaga yang kurang responsif jika pengawasannya sering tertunda.

Ketepatan sasaran audit tidak semua unit kerja yang memiliki risiko tinggi mendapatkan prioritas dalam pengawasan karena keterbatasan sumber daya. Akibatnya, ada potensi penyimpangan yang tidak terdeteksi lebih awal. Ketepatan sasaran dalam pengawasan sangat penting agar Inspektorat dapat fokus pada unit kerja atau sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap penyimpangan. Namun, dalam praktiknya, Inspektorat DIY masih mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas pengawasan secara optimal.

Faktor yang mempengaruhi ketepatan sasaran audit terbatasnya jumlah auditor: Karena jumlah auditor yang tidak mencukupi, Inspektorat harus memilih objek audit yang dianggap paling penting, sementara unit kerja dengan risiko tinggi lainnya mungkin tidak mendapatkan pengawasan yang memadai (Masnia, 2021). Kurangnya sistem penilaian risiko berbasis teknologi: Saat ini, Inspektorat DIY belum sepenuhnya menerapkan risk-based auditing, yang berarti bahwa keputusan mengenai objek audit masih banyak dilakukan secara manual tanpa analisis risiko berbasis data (Mahulae et al., 2022).

Adanya pengaruh kebijakan dari pusat kadang-kadang, Inspektorat mendapatkan mandat dari pemerintah pusat untuk melakukan audit terhadap sektor tertentu, yang membuat sektor lain dengan risiko tinggi tidak menjadi prioritas.

Dampak dari ketidaktepatan sasaran audit potensi penyimpangan yang tidak terdeteksi lebih awal: Jika sektor dengan risiko tinggi tidak mendapatkan prioritas dalam audit, maka ada kemungkinan besar bahwa penyimpangan keuangan atau administrasi terjadi tanpa segera diketahui. Penggunaan sumber daya yang kurang efisien: Auditor mungkin menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengawasi sektor yang risikonya relatif rendah, sementara sektor dengan risiko lebih tinggi dibiarkan tanpa pengawasan optimal.

Akurasi dan kualitas data audit yang diperoleh dalam proses audit terkadang belum lengkap atau kurang valid karena masih mengandalkan dokumen manual tanpa verifikasi silang berbasis teknologi. Ketepatan sasaran dalam pengawasan sangat penting agar Inspektorat dapat fokus pada unit kerja atau sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap penyimpangan. Namun, dalam praktiknya, Inspektorat DIY masih mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas pengawasan secara optimal.

Faktor yang mempengaruhi ketepatan sasaran audit terbatasnya jumlah auditor: Karena jumlah auditor yang tidak mencukupi, Inspektorat harus memilih objek audit yang dianggap paling penting, sementara unit kerja dengan risiko tinggi lainnya mungkin tidak mendapatkan pengawasan yang memadai (Masnia, 2021). Kurangnya sistem penilaian risiko berbasis teknologi: Saat ini, Inspektorat DIY belum sepenuhnya menerapkan risk-based auditing, yang berarti bahwa keputusan mengenai objek audit masih banyak dilakukan secara manual tanpa analisis risiko berbasis data (Mahulae et al., 2022). Adanya pengaruh kebijakan dari pusat: Kadang-kadang, Inspektorat mendapatkan mandat dari pemerintah pusat untuk



melakukan audit terhadap sektor tertentu, yang membuat sektor lain dengan risiko tinggi tidak menjadi prioritas.

Dampak dari ketidaktepatan sasaran audit potensi penyimpangan yang tidak terdeteksi lebih awal: Jika sektor dengan risiko tinggi tidak mendapatkan prioritas dalam audit, maka ada kemungkinan besar bahwa penyimpangan keuangan atau administrasi terjadi tanpa segera diketahui. Penggunaan sumber daya yang kurang efisien: Auditor mungkin menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengawasi sektor yang risikonya relatif rendah, sementara sektor dengan risiko lebih tinggi dibiarkan tanpa pengawasan optimal.

Dampak dari efektivitas pengawasan yang masih belum optimal ini meliputi meningkatnya potensi penyimpangan keuangan. Beberapa sektor, seperti proyek infrastruktur dan pengelolaan aset daerah, masih memiliki celah penyimpangan akibat lemahnya pengawasan. Beberapa sektor, seperti proyek infrastruktur dan pengelolaan aset daerah, masih memiliki celah penyimpangan akibat lemahnya pengawasan. Kasus renovasi Stadion Mandala Krida dengan dugaan kerugian negara Rp31,7 miliar adalah contoh nyata bagaimana lemahnya pengawasan dapat memungkinkan penyalahgunaan anggaran terjadi dalam skala besar (Firdaus, 2023). Kasus penyalahgunaan tanah kas desa menunjukkan bagaimana aset daerah dapat disalahgunakan tanpa pengawasan yang ketat (Ria & Junianto, 2023).

Tertundanya tindak lanjut rekomendasi audit beberapa rekomendasi hasil audit tidak segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait, sehingga perbaikan tata kelola keuangan dan administrasi daerah menjadi lambat. Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi audit menyebabkan permasalahan yang sama berulang setiap tahun. Kurangnya mekanisme sanksi bagi dinas yang tidak menindaklanjuti hasil audit menyebabkan rekomendasi sering kali hanya menjadi formalitas tanpa implementasi yang nyata.

Meningkatnya beban kerja auditor keterbatasan auditor menyebabkan pengawasan berjalan lebih lambat dan kurang menyeluruh, yang berdampak pada penurunan efektivitas pengawasan secara keseluruhan. Auditor harus menangani lebih banyak unit kerja daripada yang ideal, sehingga kualitas audit menjadi kurang optimal. Tingkat stres dan kelelahan auditor meningkat, yang dapat berdampak pada akurasi hasil audit dan produktivitas mereka secara keseluruhan. Inspektorat DIY telah berhasil meningkatkan transparansi dalam beberapa sektor, terutama dalam pengawasan dana pendidikan dan kesehatan. Hal ini tercermin dalam meningkatnya kepatuhan instansi pemerintah terhadap standar pelaporan keuangan daerah (Widiana, 2020).

Pengurangan potensi fraud meskipun masih terdapat tantangan, pengawasan yang dilakukan telah berhasil mengidentifikasi beberapa potensi penyimpangan sebelum terjadi kerugian besar bagi negara (Putra, 2015). Berdasarkan temuan penelitian, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Inspektorat DIY meliputi:

1. Menambah jumlah auditor dan meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan berbasis teknologi audit modern.
2. Mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pengawasan, termasuk untuk sertifikasi auditor dan pembelian perangkat lunak audit berbasis risiko.
3. Mengembangkan sistem pengawasan berbasis data yang terintegrasi dengan sistem informasi keuangan daerah.
4. Memperkuat regulasi terkait kewenangan Inspektorat dalam menindaklanjuti hasil audit dan rekomendasi pengawasan.
5. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pengawas lainnya, seperti BPK dan KPK, untuk menangani kasus yang berskala lebih besar.

Pembahasan



Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor ini mencakup sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, sistem informasi dan teknologi, kompleksitas tugas, serta efektivitas hasil pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan. Untuk memahami lebih dalam, pembahasan berikut menguraikan permasalahan yang ada serta solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

1. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengawasan

1) Jumlah Auditor yang Tidak Memadai

Pengawasan yang efektif membutuhkan jumlah auditor yang memadai agar setiap aspek dalam pemerintahan dapat diawasi secara optimal. Inspektorat DIY hanya memiliki 73 personel pengawasan pada tahun 2024, yang terdiri dari auditor dan staf administrasi. Jumlah ini masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB, yang mengindikasikan bahwa jumlah ideal untuk mengawasi pemerintahan DIY adalah minimal 120 auditor. Kekurangan tenaga auditor menyebabkan beberapa permasalahan seperti:

Banyaknya unit kerja yang tidak dapat diaudit secara menyeluruh. Auditor harus menangani 10–15 unit kerja, padahal standar idealnya adalah 5 unit kerja per auditor. Audit yang dilakukan sering kali mengalami keterlambatan karena keterbatasan tenaga kerja.

2) Kesenjangan Kompetensi Auditor

Selain jumlah yang tidak mencukupi, kompetensi auditor juga menjadi tantangan. Beberapa auditor belum memiliki sertifikasi khusus dalam bidang audit berbasis teknologi dan analisis risiko, yang semakin penting dalam era digitalisasi pemerintahan. Beberapa auditor masih menggunakan metode konvensional dalam proses audit, sehingga sulit mendeteksi penyimpangan yang lebih kompleks.

3) Beban Kerja Berlebihan dan Dampaknya

Beban kerja yang terlalu tinggi berdampak pada penurunan kualitas pengawasan, karena auditor tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap laporan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta penggunaan anggaran daerah. Beban kerja yang tinggi juga dapat meningkatkan tingkat kelelahan auditor, yang berpotensi menurunkan objektivitas dan ketelitian dalam audit.

Solusi:

Penambahan jumlah auditor melalui rekrutmen tenaga pengawas yang lebih banyak. Peningkatan kompetensi auditor dengan pelatihan berkelanjutan mengenai audit berbasis teknologi, forensik keuangan, dan manajemen risiko. Pembagian tugas yang lebih merata agar setiap auditor memiliki beban kerja yang sesuai standar.

2. Keterbatasan Anggaran dan Pengaruhnya terhadap Efektivitas Pengawasan

1) Alokasi Anggaran yang Rendah

Anggaran yang diberikan kepada Inspektorat DIY untuk kegiatan pengawasan masih tergolong rendah, hanya sekitar 1,2% dari total APBD DIY. Anggaran yang terbatas menyebabkan beberapa dampak negatif, seperti: Tidak semua program pengawasan dapat terlaksana sesuai perencanaan. Keterbatasan dalam melakukan audit lapangan karena biaya operasional yang tidak mencukupi. Pengurangan jumlah pelatihan bagi auditor karena keterbatasan dana untuk sertifikasi dan pengembangan SDM.

2) Dampak pada Kegiatan Pengawasan

Keterbatasan anggaran menyebabkan Inspektorat DIY tidak dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap semua proyek dan program pemerintah daerah. Beberapa proyek infrastruktur dan pengelolaan aset daerah yang berisiko tinggi tidak dapat diawasi dengan baik karena kurangnya dana operasional untuk melakukan inspeksi lapangan.

Solusi:



Peningkatan alokasi anggaran dengan memperjuangkan tambahan dana untuk pengawasan dalam APBD DIY. Optimalisasi penggunaan anggaran dengan memprioritaskan program audit yang memiliki risiko tinggi. Kerja sama dengan pihak eksternal, seperti BPK dan KPK, untuk berbagi sumber daya dalam pengawasan proyek besar.

3. Sistem Informasi dan Teknologi dalam Pengawasan

1) Kurangnya Digitalisasi dalam Proses Pengawasan

Saat ini, pengawasan Inspektorat DIY masih banyak dilakukan secara manual atau semi-digital. Beberapa auditor masih menggunakan dokumen fisik dalam proses audit, yang memperlambat pencarian data dan analisis laporan keuangan.

2) Tidak Adanya Sistem Pengawasan yang Terintegrasi

Inspektorat DIY belum memiliki sistem informasi pengawasan yang terintegrasi dengan dinas-dinas lain di DIY. Akibatnya, pertukaran informasi antar instansi masih berjalan lambat, dan banyak data keuangan serta proyek yang tidak dapat dipantau secara real-time.

3) Minimnya Penggunaan Analisis Data Berbasis Risiko

Di banyak daerah lain, pengawasan telah menggunakan sistem berbasis teknologi, seperti risk-based auditing dan artificial intelligence untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Inspektorat DIY belum mengadopsi teknologi ini secara optimal, sehingga pengawasan masih bergantung pada metode konvensional yang kurang efektif dalam mendeteksi kasus penyimpangan kompleks.

Solusi:

Pengembangan sistem informasi pengawasan terintegrasi yang dapat memantau laporan keuangan dan proyek pemerintah secara real-time. Penerapan teknologi analisis risiko untuk mengidentifikasi pola penyimpangan sejak dini. Pelatihan auditor dalam penggunaan teknologi audit berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan.

4. Kompleksitas Tugas dan Tantangan Eksternal

1) Mandat yang Sering Berubah

Inspektorat DIY sering kali mendapatkan mandat baru dari pemerintah pusat yang mengubah prioritas pengawasan. Hal ini menyebabkan perencanaan pengawasan menjadi tidak stabil dan sulit untuk menjalankan strategi jangka panjang.

2) Pengawasan atas Kasus Korupsi Besar

Inspektorat DIY menghadapi tantangan dalam menangani kasus besar, seperti dugaan korupsi proyek Stadion Mandala Krida dan penyalahgunaan tanah kas desa. Pengawasan kasus besar memerlukan sumber daya lebih banyak, tetapi sering kali terkendala oleh keterbatasan auditor dan anggaran.

3) Koordinasi dengan Lembaga Lain

Kurangnya koordinasi antara Inspektorat DIY dengan BPK, KPK, dan lembaga pengawas lainnya menyebabkan pengawasan menjadi tumpang tindih dan lambat dalam tindak lanjut hasil audit.

Solusi:

Meningkatkan koordinasi dengan BPK, KPK, dan lembaga pengawas lainnya untuk mempercepat penyelesaian kasus besar. Menerapkan pengawasan berbasis risiko agar pengawasan lebih fokus pada sektor-sektor dengan potensi penyimpangan tinggi.

Mengembangkan kebijakan pengawasan yang lebih fleksibel agar dapat menyesuaikan diri dengan mandat yang berubah-ubah dari pemerintah pusat.

5. Efektivitas Pengawasan dan Dampaknya

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pengawasan masih belum optimal karena berbagai faktor yang telah dijelaskan di atas. Beberapa dampak dari lemahnya pengawasan antara lain:

Masih adanya penyimpangan dalam proyek infrastruktur dan pengelolaan aset daerah.

Tindak lanjut hasil audit yang lambat karena keterbatasan tenaga auditor dan anggaran. Kurangnya transparansi dalam beberapa aspek pemerintahan daerah akibat minimnya sistem informasi pengawasan yang terintegrasi.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan:

1. Meningkatkan jumlah auditor dan kompetensinya melalui pelatihan berkelanjutan.
2. Meningkatkan anggaran pengawasan agar program audit dapat berjalan optimal.
3. Mengembangkan sistem pengawasan digital berbasis risiko dan teknologi AI.
4. Meningkatkan sinergi dengan lembaga eksternal untuk mempercepat tindak lanjut hasil audit.

Dengan menerapkan solusi ini, Inspektorat DIY dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi faktor utama yang memengaruhi efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yakni keterbatasan sumber daya manusia (SDM), anggaran, sistem informasi dan teknologi, serta kompleksitas tugas. Keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor menghambat ketepatan waktu serta kualitas pengawasan, sementara anggaran yang tidak mencukupi membatasi pelaksanaan program, termasuk pelatihan SDM dan pengembangan infrastruktur teknologi. Minimnya sistem pengawasan berbasis teknologi juga menghambat efektivitas pengawasan, menyebabkan proses menjadi lambat dan rentan terhadap kesalahan. Selain itu, dinamika tugas yang semakin kompleks, seperti perubahan mandat kementerian dan penanganan kasus besar, menuntut adaptasi yang tinggi meskipun keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala. Meskipun pengawasan Inspektorat DIY telah berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas di beberapa sektor seperti pendidikan dan kesehatan, masih ditemukan celah yang memungkinkan penyimpangan, menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan belum sepenuhnya optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta: CV Syakir Media Press.
- Ariandi, A. (2019). Pengaruh kompetensi pegawai terhadap efektivitas pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah (studi kasus pada pemeriksaan kinerja). *Jurnal Simplex*, 2(3), 53–62.
- Firdaus, H. (2023, Juli 17). Terima gratifikasi Rp 4,7 miliar dari mafia tanah, kepala Disptaru DIY jadi tersangka. *Kompas*. <https://www.kompas.id>
- Inspektorat DIY. (2022). *Rancangan RENSTRA 2022–2027: Rencana strategis Inspektorat DIY*. Yogyakarta: Inspektorat DIY.
- Islamiah, R. Q., Noak, P. A., & Winaya, I. K. (2016). Efektivitas pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terhadap penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 di Kabupaten Badung. *Citizen Charter: Jurnal Administrasi Publik*, 1, 1–7.
- Kementerian PANRB. (2023). *Surat Menteri PANRB Nomor B/516/M.SM.01.00/2023: Persetujuan usulan kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan DIY*. Jakarta: Kementerian PANRB.



- Masnia, M. B., & Rahman. (2021). Analisis efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana. *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 12(2), 172–179.
- Nabilah, & Canallidhy, R. S. (2018). Efektivitas fungsi pengawasan Inspektorat terhadap kinerja pegawai (studi kasus Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 3, 22–26.
- Putra, A. E. (2015). Peranan pengawasan dalam meningkatkan efektivitas kerja karyawan pada PT Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 12(1), 54–67.
- Remus, S. P. (2017). Analisis sistem pengawasan terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Mandiri Cabang Krakatau Medan. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 3(2), 26–35.
- Tuidano, E., Kaunang, M., & Kimbal, A. (2017). Pengawasan Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Ternate. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 23–33.
- Yana, W., Muhammad, A., & Edison. (2020). Efektivitas reformasi agraria melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(2), 133–146. <https://doi.org/10.31629/juan.v8i2.2796>
- Yemima, P. A., Pakpahan, E. Y., Fauzan, M., Adianto, T. O., & Darmawan, I. (2024). Analisis efektivitas pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Kabupaten Pangandaran. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial, dan Administrasi Negara*, 1(3), 298–307. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.571>.
- Rafif, M. (2021). Efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah pada pemeriksaan pengelolaan barang milik daerah. Diakses dari <https://eprints.ipdn.ac.id/8119/1/RAFIF.pdf>
- Rahman, T., & Fuad, M. (2020). Analisis efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana. *Publika*, 3(1), 1-15. Diakses dari <https://ojs.uho.ac.id/index.php/publika/article/download/14175/pdf>
- Tandi, R. (2020). Analisis efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Konawe. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 45-56.